

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan **EVALUASI RENJA TRIWULAN IV DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022** ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sekaligus dalam rangka terwujudnya aparatur yang bersih, bertanggungjawab dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan bahan-bahan mulai dari tahap perencanaan sampai selesainya penyusunan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan gambaran hasil kinerja dan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja kelembagaan dan aparatur pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Februari 2023

**Plt. KEPALA DINAS**



**Ir. YULIASTUTI, MTA**

Pembina Tk I/IVb

NIP. 19670711 199203 2 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
BAB II. PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....	8
BAB III. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH .....	15
3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Triwulan IV (Semester II) .....	15
3.2 Realisasi Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022 (Sesuai aplikasi di Simonev) .....	15
BAB IV. HAMBATAN DAN KENDALA .....	22
4.1 Hambatan dan Kendala .....	22
4.2 Upaya Pemecahan Masalah .....	22
BAB V. PENUTUP .....	23
5.1 Kesimpulan .....	23
5.2 Rekomendasi .....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kesesuaian Kegiatan Renja 2022 Terhadap Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	14

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indikator Sasaran Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 .....	7
2. Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara Renja Perangkat Daerah Dengan APBD Tahun 2022 .....	9

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dasar hukum Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022

## 1.2 Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, maka evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai penunjuk arah, pedoman dan landasan dalam Penyelenggaraan Pengawasan selama tahun 2019 sampai dengan 2024 secara garis besar.

Sedangkan tujuan dari evaluasi hasil rencana kerja (Renja) SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah sebagai pedoman untuk penyusunan Evaluasi Renja Pemerintah Daerah (RKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Rencana strategis Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan landasan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kegiatan pembangunan di bidang perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsi kedinasan yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran dinas. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam kebijakan, program prioritas serta kegiatan-kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan unsur penunjang

Pemerintah Provinsi dalam urusan Pertanian bidang Perkebunan. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Provinsi di bidang perkebunan. Dinas Perkebunan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan peraturan, perencanaan dan penetapan standar operasional bidang prasarana dan sarana perkebunan;
- b. Penataan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- d. Pengawasan sarana perkebunan;
- e. Pembinaan produksi di bidang perkebunan;
- f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- g. Pembinaan pengolahan, pemasaran hasil serta promosi hasil perkebunan;
- h. Pemberian ijin usaha/ rekomendasi teknis dalam bidang perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi program pembangunan bidang perkebunan;
- j. Pelaksanaan administrasi dinas dan tata laksana perkebunan;
- k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas, fungsi dan kewenangan

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Terdiri Dari:

1. Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan
2. Bidang Produksi;
  - a. Seksi Tanaman Tahunan

- b. Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar
  - c. Seksi Tanaman Semusim dan Tanaman Perkebunan Lainnya
3. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan;
- a. Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pembinaan Usaha
  - b. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha
  - c. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
4. Bidang Prasarana dan Sarana;
- a. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Perkebunan
  - b. Seksi Perbenihan
  - c. Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
- a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
  - b. Seksi Standarisasi dan Mutu Hasil
  - c. Seksi Promosi dan Pemasaran
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
  - b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih
  - c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

### **1.3 Indikator Sasaran**

Visi pembangunan jangka menengah daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Lampung menjadi modal dasar Provinsi Lampung menghadapi tantangan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia tahun



2005-2025 dan visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah:

### **"RAKYAT LAMPUNG BERJAYA"**

Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

➤ **Kehidupan masyarakat yang aman**

Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

➤ **Kehidupan masyarakat yang berbudaya**

Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunannya.

➤ **Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing**

Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

➤ **Kehidupan yang sejahtera**

Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Kesemua kondisi tersebut di atas adalah selaras dan mendukung untuk tercapainya visi yang telah digariskan melalui Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu **"LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025"**.

Pada periode Renstra 2019 - 2024 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 6 (enam) misi yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "Good Governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sektor Perkebunan Provinsi Lampung masuk ke dalam misi ke 5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Provinsi Lampung yaitu :

**Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**

Berdasarkan dari 6 (enam) misi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 tersebut di atas Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung termasuk didalam misi 5 (lima). Perencanaan strategis dalam rangka menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut (tabel 1.)

**Tabel 1. Indikator Sasaran Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2019)	Target Tahun 2022
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi tanaman perkebunan (ton)	661.690	834.990
		a. Lada	15.633	15.464
		b. Kopi Robusta	93.770	117.780
		c. Tebu	68.398	189.606
		d. Karet	146.125	164.706
		e. Kakao	51.601	61.250
		f. Kelapa Sawit	187.583	199.969
		g. Kelapa Dalam	98.579	86.225

## **BAB II PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DENGAN DOKUMEN DPA DAN RENSTRA OPD**

### **2.1 Kesesuaian Program, Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Dokumen Renja dengan DPPA OPD**

Anggaran Pembangunan bidang perkebunan yang bersumber dari APBD-P Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 29.983.043.811,95- yang terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja hibah, dimana anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan enam (6) program dan tiga belas (13) kegiatan dan tiga puluh (30) sub kegiatan dengan melibatkan unit-unit kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, UPTD BP2MB, UPTD Perlintan, dan UPTD BBKI.

Program/Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Alokasi Anggaran APBD-P Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2.1 Program/Kegiatan dan Alokasi Anggaran APBD Renja Tahun 2022 dibandingkan dengan DPPA OPD Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Renja 2022		DPPA 2022	
			K	Rp.	K	Rp.
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	18.015.756.493	100 persen	16.374.414.561,95
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 dokumen	229.274.999,92	16 dokumen	194.832.999,92
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	14.631.396.988,08	12 bulan	12.816.985.057,03
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	109.237.000,00	12 bulan	109.237.000,00
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum	12 bulan	863.453.000,00	12 bulan	961.515.000,00
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.489.052.505,00	12 bulan	1.489.052.505,00
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	693.342.000,00	12 bulan	802.792.000,00
II.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	5 persen	375.000.000,00	5 persen	350.000.000,00
	a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan peredaran sarana pertanian	15 kab/kota	75.000.000,00	15 kab/kota	75.000.000,00

	b. Pengawasan Mutu dan Penyediaan sumber benih/bibit perkebunan	Persentase Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	15 kab/kota	300.000.000,00	15 kab/kota	275.000.000,00
III.	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>3 persen</b>	<b>6.170.000.000,00</b>	<b>3 persen</b>	<b>8.162.794.000,00</b>
	a. Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Penataan Prasarana Pertanian	3 persen	6.170.000.000,00	3 persen	8.162.794.000,00
IV.	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana pertanian</b>	<b>Persentas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>25 persen</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>25 persen</b>	<b>250.000.000,00</b>
	a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	25 persen	400.000.000,00	25 persen	250.000.000,00
V.	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Persentase Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>30 persen</b>	<b>343.000.000,00</b>	<b>30 persen</b>	<b>250.000.000,00</b>
	a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	30 persen	343.000.000,00	30 persen	250.000.000,00
VI.	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Penyuluhan Pertanian</b>	<b>20 persen</b>	<b>4.439.710.250,00</b>	<b>20 persen</b>	<b>4.595.835.250,00</b>
	a. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	20 persen	3.889.710.250,00	20 persen	4.245.835.250,00
	b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	20 persen	550.000.000,00	20 persen	350.000.000,00
	<b>Jumlah (A + B)</b>			<b>29.743.466.743,00</b>		<b>29.983.043.811,95</b>

## **2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Dokumen Renja dengan Renstra OPD**

Renstra atau Dokumen Perencanaan Daerah adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, strategis, program, dan kegiatan daerah. Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah menyusun rencana pembangunan perkebunan yang dituangkan melalui program/kegiatan selama 5 (lima) tahun yaitu 2019-2024 baik melalui anggaran APBD Provinsi Lampung (desentralisasi) dan anggaran APBN (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) sekaligus merupakan indikator kinerja Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Mengingat kewenangan yang terbatas, maka perencanaan pembangunan tersebut disusun secara antisipatif, realistis dan dengan segmen yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sekaligus menunjang perwujudan visi dan misi Provinsi Lampung.

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 merujuk kepada Rencana Strategis yang telah disusun untuk pembangunan selama 5 (lima) tahunan untuk meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Kesesuaian Program, Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Dokumen Renja dengan Renstra OPD Dinas Perkebunan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2. Program/Kegiatan dan Alokasi Anggaran APBD pada Renja Tahun 2022 dibandingkan dengan Renstra Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung**

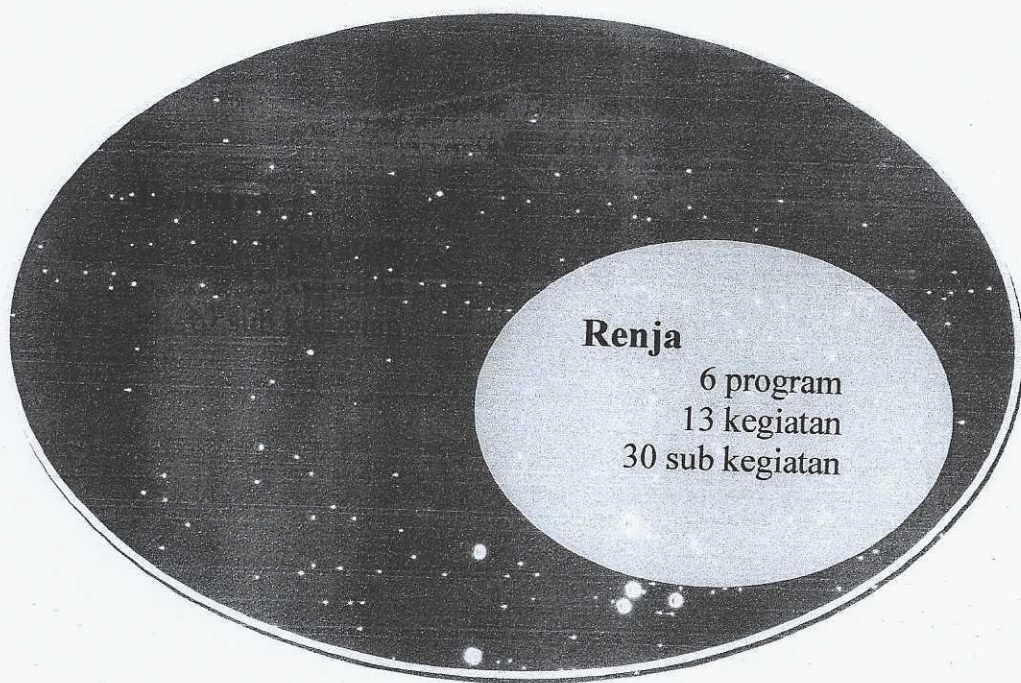
No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Renja 2022		Renstra 2022	
			K	Rp.	K	Rp.
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100 persen</b>	<b>18.015.756.493</b>	<b>100 persen</b>	<b>18.015.756.493</b>
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 dokumen	229.274.999,92	16 dokumen	229.274.999,92
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	14.631.396.988,08	12 bulan	14.631.396.988,08
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	109.237.000	12 bulan	109.237.000
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	863.453.000	12 bulan	863.453.000
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.489.052.505	12 bulan	1.489.052.505
<b>II.</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</b>	<b>12 bulan</b>	<b>693.342.000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>693.342.000</b>
	a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan peredaran sarana pertanian	<b>5 persen</b>	<b>375.000.000</b>	<b>5 persen</b>	<b>375.000.000</b>
	b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	15 kab/ kota	75.000.000	15 kab/ kota	75.000.000



III.	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	15 kab/ kota	300.000.000	15 kab/ kota	300.000.000
	a. Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Penataan Prasarana Pertanian	3 persen	6.170.000.000	3 persen	6.170.000.000
IV.	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	3 persen	6.170.000.000	3 persen	6.170.000.000
	a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	25 persen	400.000.000	25 persen	400.000.000
V.	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Persentase Perizinan Usaha Pertanian</b>	25 persen	400.000.000	25 persen	400.000.000
	a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	30 persen	343.000.000	30 persen	343.000.000
VI.	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Penyuluhan Pertanian</b>	30 persen	343.000.000	30 persen	343.000.000
	a. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	20 persen	4.439.710.250	20 persen	4.439.710.250
	b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	20 persen	3.889.710.250	20 persen	3.889.710.250

Irisan kesesuaian kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 terhadap Renstra Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menggambarkan bahwa dalam Renstra yang telah disusun terdapat 6 program 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang mendukung tupoksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Dari 30 sub kegiatan yang ada dalam Renstra, terdapat 30 sub kegiatan pada Renja Tahun 2022 dan seluruh kegiatan terakomodir didalam Renstra. Kesesuaian kegiatan yang terakomodir dalam renstra tersebut dapat dilihat dalam gambar 1.

Gambar 1. Kesesuaian Kegiatan Renja 2022 Terhadap Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Triwulan IV (Semester II)**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target TW IV	Realisasi TW IV*	Persen (%)
1	Jumlah produksi lada rakyat (ton)	15.464	15.464	15.455	100
2	Jumlah produksi kopi robusta rakyat (ton)	117.780	117.780	118.139	100
3	Jumlah produksi tebu rakyat (ton)	189.606	189.606	184.006	100
4	Jumlah produksi karet rakyat (ton)	164.706	164.706	192.395	100
5	Jumlah produksi kakao rakyat (ton)	61.250	61.250	53.991	100
6	Jumlah produksi kelapa sawit rakyat (ton)	199.959	199.959	202.216	100
7	Jumlah produksi kelapa dalam rakyat (ton)	86.225	86.225	78.319	100

\*Angka Sementara Dinas Perkebunan 2022

**3.2 Realisasi Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022**

Evaluasi Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 merupakan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki. Untuk mendukung terwujudnya visi misi yang terdapat pada RPJMD Tahun 2019-2024 Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah dicanangkan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Dari hasil evaluasi kinerja, terlihat keterkaitan erat pencapaian kinerja masing-masing kegiatan dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan guna mewujudkan sasaran, tujuan, misi serta visi tersebut.

Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan yang bersumber dana APBD-P Tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung triwulan IV

dengan total anggaran Rp. 29.983.043.811,95,- dengan realisasi keuangan sampai triwulan IV sebesar Rp. 27.233.919.417,00,- (90,83%) dan realisasi capaian kinerja meliputi :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.374.414.561,95,-. Capaian realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 15.508.760.352,92,- (94,71%) dan realisasi kinerja sebesar 100 %.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 6 dokumen dengan pagu anggaran Rp 129.558.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 129.558.000,- (100%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 10 dokumen dengan pagu anggaran Rp 65.274.999,92,- realisasi keuangan Rp. 65.274.800,- (100%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan pagu anggaran Rp. 12.794.065.057,03- realisasi keuangan sebesar Rp. 12.465.408.236,- (97,43%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen dengan pagu anggaran Rp. 22.920.000,00 realisasi keuangan Rp. 20.593.000,- (89,85%) dan realisasi kinerja sebesar 100 %.
5. Pemindehan Tugas ASN sebanyak 5 dokumen dengan pagu anggaran Rp. 36.320.000,- realisasi keuangan Rp. 26.819.800,- (73,84%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.

6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150 orang selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp. 72.917.000,- realisasi keuangan Rp. 68.909.000,- (94,50%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 22.015.500 (44,03%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,- realisasi keuangan Rp. 44.933.900,- (59,91%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp. 34.800.000,- realisasi keuangan Rp. 12.950.000,- (37,21%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
10. Penyediaan Bahan/Material selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp. 173.322.300,- realisasi keuangan Rp. 125.622.523,- (72,48%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
11. Fasilitasi kunjungan Tamu selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 35.537.000,- (71,07%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp. 578.392.700,- realisasi keuangan Rp. 526.031.365,- (90,95%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp. 410.000.000,- realisasi keuangan Rp.197.991.462,- (48,29%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.

14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket dengan pagu anggaran Rp. 493.402.505,- realisasi keuangan Rp.475.476.685,- (96,37%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 dokumen dengan pagu anggaran Rp. 585.650.000,- realisasi keuangan Rp.526.797.100,- (85,33%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp. 333.342.000,- realisasi keuangan Rp.332.625.179,- (99,78%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 29.180.000,- (58,36%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 unit dengan pagu anggaran Rp. 373.070.000,- realisasi keuangan Rp. 369.319.000,- (98,99%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp. 46.380.000,- realisasi keuangan Rp. 33.717.803,- (72,70%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.

**B. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Capaian realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 319.385.500,- (92,23%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.

1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian untuk 5 kabupaten dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,- realisasi keuangan Rp. 68.513.000,- (91,35%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
2. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih sebanyak 20 sertifikat dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. 99.998.500,- (100%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
3. Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Penerbitan Benih/Bibit Perkebunan untuk 15 kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp. 175.000.000,- realisasi keuangan Rp. 150.874.000,- (86,21%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.

#### **C. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.162.794.000,-. Capaian realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 7.495.826.414,- (94,47%) dan realisasi kinerja sebesar 97,54%.

1. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian sebanyak 82 urit dengan pagu anggaran Rp. 7.532.864.000,- realisasi keuangan Rp. 6.889.319.010,- (91,46%) dan realisasi kinerja sebesar 97,34%.
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian selama 12 bulan dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- realisasi keuangan Rp. 244.889.000,- (96,76%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya seluas 20 hektar dengan pagu

anggaran Rp. 379.000.000,- realisasi keuangan Rp.361.618.404,- (95,18%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.

#### **D. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Capaian realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 245.435.000,- (95,44%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.

1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 1 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi keuangan Rp. 200.000.000,- (100%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
2. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebanyak 1 kasus dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 45.435.000,- (90,87%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.

#### **E. Program Perizinan Usaha Pertanian**

Program Perizinan Usaha Pertanian terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Capaian realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 231.721.350,- (92,69%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.

1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian sebanyak 2 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- realisasi keuangan Rp. 231.721.350,- (92,69%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.



## **F. Program Penyuluhan Pertanian**

Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.595.835.250,-. Capaian realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 3.432.790.800,- (89,00%) dan realisasi kinerja sebesar 85,37%.

1. Desiminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian sebesar persen dengan pagu anggaran Rp. 4.245.835.250,- realisasi keuangan Rp. 3.093.159.800,- (83,13%) dan realisasi kinerja sebesar 84,16%.
2. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani sebanyak 2 kelompok tani dengan pagu anggaran Rp. 350.000.000,- realisasi keuangan Rp. 339.631.000,- (94,87%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.

## **BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA**

### **4.1 Hambatan dan Kendala**

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan pemetaan kegiatan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ada pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

### **4.2 Upaya Pemecahan Masalah**

Telah dilakukan pemetaan kegiatan pada Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya perlu dilakukan Revisi Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

### **5.1 Kesimpulan**

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program kegiatan yang didanai dari APBD Provinsi Lampung. Evaluasi Renja menggambarkan kesesuaian antara rencana kerja Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 terhadap Renstra 2019-2024. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 merujuk kepada Rencana Startegis yang telah disusun untuk pembangunan selama 5 (lima) tahunan untuk meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. Perencanaan pembangunan disusun secara antisipatif, realistis dan dengan segmen yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan visi dan misi yang terdapat pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Capaian Kinerja Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2022 dari total anggaran Rp. 29.983.043.811,95,- telah terealisasi sebesar Rp. 27.233.919.417,00,- (90,83%) dan realisasi fisik 90,83%.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesesuaian antara Renja Tahun 2022 terhadap Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 semua kegiatan yang terdapat pada Renja Tahun 2022 telah terakomodir di dalam Renstra Tahun 2019-2024. Diharapkan ke depan bidang perkebunan dapat lebih baik lagi dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi pelaporan yang berguna untuk pengambilan kebijakan pembangunan bidang perkebunan di masa depan.

# LAMPIRAN

Laporan Triwulan Dinas Perkebunan Tahun 2022

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out come) / Kegiatan(Ou tcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persen	100	20.623.604.443,00			100	16.374.414.951,95	36	1.917.628.443,00	96	2.831.324.026,00	205	10.696.334.088,00	308	15.508.760.353,00	8,00	9 = 8 / 7	10 = 6 + 8	11 = 10 / 5							
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																										
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	6	550.000.000,00	0	0	6	129.558.000,00	1	27.181.000,00	3	27.181.000,00	4	57.546.300,00	6	129.558.000,00											
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	dokumen	10	260.000.000,00	0	0	10	65.274.999,92	2	11.835.300,00	5	11.835.300,00	8	27.034.400,00	10	65.274.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6	129.558.000,00	100,00	23,56	Dinas Perkebunan		
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	14.791.520.000,00	0	0	12	12.794.065.057,03	3	1.593.823.560,00	6	2.507.519.143,00	9	9.396.980.495,00	12	12.465.408.236,00	100,00	97,43	12	12.465.408.236,00	100,00	84,27	12	12.465.408.236,00	100,00	25,11	Dinas Perkebunan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan																										
3.27.01.1.02.07	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	1	200.000.000,00	0	0	1	22.920.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	97,43	12	12.465.408.236,00	100,00	84,27	12	12.465.408.236,00	100,00	25,11	Dinas Perkebunan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																										
3.27.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	dokumen	5	50.000.000,00	0	0	5	36.320.000,00	0	5.910.000,00	2	5.910.000,00	3	11.709.800,00	5	26.819.800,00	100,00	73,84	5	26.819.800,00	100,00	53,64	5	26.819.800,00	100,00	53,64	Dinas Perkebunan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	150	100.000.000,00	0	0	150	72.917.000,00	0	7.088.000,00	20	7.088.000,00	90	25.172.400,00	150	68.909.000,00	100,00	94,50	150	68.909.000,00	100,00	68,91	150	68.909.000,00	100,00	68,91	Dinas Perkebunan
3.27.01.1.06.03	Administrasi Urum Perangkat Daerah																										
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	100.000.000,00	0	0	12	50.000.000,00	3	0	6	0	9	11.673.400,00	12	22.015.500,00	100,00	44,03	12	22.015.500,00	100,00	22,02	12	22.015.500,00	100,00	22,02	Dinas Perkebunan
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	100.000.000,00	0	0	12	75.000.000,00	3	8.941.600,00	6	8.941.600,00	9	25.941.100,00	12	44.933.900,00	100,00	59,91	12	44.933.900,00	100,00	44,93	12	44.933.900,00	100,00	44,93	Dinas Perkebunan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	100.000.000,00	0	0	12	34.800.000,00	3	5.000.000,00	6	5.000.000,00	9	7.550.000,00	12	12.950.000,00	100,00	37,21	12	12.950.000,00	100,00	12,95	12	12.950.000,00	100,00	12,95	Dinas Perkebunan
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	300.000.000,00	0	0	12	173.322.300,00	3	20.692.100,00	6	20.692.100,00	9	44.192.100,00	12	125.622.523,00	100,00	72,48	12	125.622.523,00	100,00	41,87	12	125.622.523,00	100,00	41,87	Dinas Perkebunan
3.27.01.1.06.08	Facilitasi kunjungan tamu	bulan	12	200.000.000,00	0	0	12	50.000.000,00	3	4.994.000,00	6	4.994.000,00	9	16.656.000,00	12	35.537.000,00	100,00	71,07	12	35.537.000,00	100,00	17,77	12	35.537.000,00	100,00	17,77	Dinas Perkebunan
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	841.084.443,00	0	0	12	578.392.700,00	3	48.187.774,00	6	48.187.774,00	9	210.239.700,00	12	526.031.365,00	100,00	90,95	12	526.031.365,00	100,00	62,54	12	526.031.365,00	100,00	62,54	Dinas Perkebunan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
3.27.01.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	410.000.000,00	0	0	12	410.000.000,00	3	30.551.179,00	6	30.551.179,00	9	103.585.898,00	12	197.991.462,00	100,00	48,29	12	197.991.462,00	100,00	48,29	12	197.991.462,00	100,00	48,29	Dinas Perkebunan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	1	1.000.000.000,00	0	0	1	493.402.505,00	0	0	0	0	0	272.746.300,00	1	475.476.685,00	100,00	96,37	1	475.476.685,00	100,00	47,55	1	475.476.685,00	100,00	47,55	Dinas Perkebunan
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	1	801.000.000,00	0	0	1	585.650.000,00	0	88.388.200,00	0	88.388.200,00	0	88.388.200,00	1	526.797.100,00	100,00	89,95	1	526.797.100,00	100,00	65,77	1	526.797.100,00	100,00	65,77	Dinas Perkebunan
3.27.01.1.08.04	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah																										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	345.000.000,00	0	0	12	333.342.000,00	3	52.821.260,00	6	52.821.260,00	9	163.884.525,00	12	332.625.179,00	100,00	99,78	12	332.625.179,00	100,00	96,41	12	332.625.179,00	100,00	96,41	Dinas Perkebunan
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	75.000.000,00	0	0	12	50.000.000,00	3	4.380.000,00	6	4.380.000,00	9	15.375.000,00	12	29.180.000,00	100,00	58,36	12	29.180.000,00	100,00	38,91	12	29.180.000,00	100,00	38,91	Dinas Perkebunan
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	2	200.000.000,00	0	0	2	373.070.000,00	0	0	0	0	1	198.724.000,00	2	369.319.000,00	100,00	98,99	2	369.319.000,00	100,00	184,66	2	369.319.000,00	100,00	184,66	Dinas Perkebunan
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	200.000.000,00	0	0	12	46.380.000,00	3	7.834.470,00	6	7.834.470,00	9	18.934.470,00	12	33.717.803,00	100,00	72,70	12	33.717.803,00	100,00	16,86	12	33.717.803,00	100,00	16,86	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persen	5	1.300.000.000,00			5	350.000.000,00	0	2.713.000,00	5	2.713.000,00	12	78.522.000,00	40	319.385.500,00	100,00	91,25	40	319.385.500,00	100,00	55,55	40	319.385.500,00	100,00	24,57	
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																										
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alami, dan Sarana Pendukung Pertanian	kabupaten/kota	15	500.000.000,00	0	0	5	75.000.000,00	0	0	0	0	0	0	5	68.513.000,00	100,00	91,35	5	68.513.000,00	100,00	33,33	5	68.513.000,00	100,00	13,70	Dinas Perkebunan
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman																										
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	sertifikat	60	100.000.000,00	0	0	20	100.000.000,00	0	1.213.000,00	5	1.213.000,00	5	1.213.000,00	20	99.998.500,00	100,00	100,00	20	99.998.500,00	100,00	33,33	20	99.998.500,00	100,00	33,33	Dinas Perkebunan
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	kabupaten/kota	15	700.000.000,00	0	0	15	175.000.000,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	7	77.309.000,00	15	150.874.000,00	100,00	86,21	15	150.874.000,00	100,00	21,55	15	150.874.000,00	100,00	21,55	Dinas Perkebunan

## Laporan Triwulan Dinas Perkebunan Tahun 2022

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out come) / Kegiatan(Du tocome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persen	3	10.720.000.000,00			3	8.162.794.000,00	3	262.101.350,00	11	262.101.350,00	44	1.110.282.150,00	113	7.495.826.414,00	97,54	91,83	113	7.495.826.414,00	100,00	69,92		
3.27.03.1.01.01	Penataan Prasarana Pertanian																							
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	unit	9	6.890.000.000,00	0	0	82	7.532.864.000,00	0	144.954.150,00	0	144.954.150,00	20	634.269.150,00	81	6.889.319.010,00	98,78	91,46	81	6.889.319.010,00	100,00	99,99	Dinas Perkebunan	
3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	bulan	12	300.000.000,00	0	0	12	250.000.000,00	3	34.543.000,00	6	34.543.000,00	9	123.013.000,00	12	244.889.000,00	100,00	97,96	12	244.889.000,00	100,00	81,63	Dinas Perkebunan	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	hektar	20	3.530.000.000,00	0	0	20	379.930.000,00	0	82.604.200,00	5	82.604.200,00	15	353.000.000,00	20	361.618.404,00	100,00	95,18	20	361.618.404,00	100,00	10,24	Dinas Perkebunan	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persen	25	950.000.000,00			25	250.000.000,00	0	42.788.600,00	0	194.594.700,00	0	166.523.584,00	2	245.435.000,00	100,00	98,17	2	245.435.000,00	66,66	25,84		
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi																							
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	kegiatan	3	850.000.000,00	0	0	1	200.000.000,00	0	41.795.400,00	0	41.795.400,00	0	156.852.384,00	1	200.000.000,00	100,00	100,00	1	200.000.000,00	33,33	23,53	Dinas Perkebunan	
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	kasus	1	100.000.000,00	0	0	1	50.000.000,00	0	973.200,00	0	973.200,00	0	9.671.200,00	1	45.435.000,00	100,00	90,87	1	45.435.000,00	100,00	45,44	Dinas Perkebunan	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persen	30	400.000.000,00			30	250.000.000,00	0	571.700,00	0	151262100	1	98.168.900,00	2	231.721.350,00	100,00	92,69	2	231.721.350,00	100,00	57,93		
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																							
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	kegiatan	2	400.000.000,00	0	0	2	250.000.000,00	0	571.700,00	0	571.700,00	1	98.168.900,00	2	231.721.350,00	100,00	92,69	2	231.721.350,00	100,00	57,93	Dinas Perkebunan	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persen	20	3.418.617.500,00			20	4.595.835.250,00	0	153.254.400,00	0	151254400	6	820.870.266,00	21	3.432.790.800,00	85,37	74,69	21	3.432.790.800,00	50,83	100,41		
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian																							
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	persen	20	2.718.617.500,00	0	0	20	4.245.835.250,00	0	145.229.000,00	0	145.229.000,00	5	578.254.600,00	19	3.093.159.800,00	95,00	72,85	19	3.093.159.800,00	95,00	113,78	Dinas Perkebunan	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan																							
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporsi Petani	Kelompok tani	30	700.000.000,00	0	0	2	350.000.000,00	0	6.025.400,00	0	6.025.400,00	1	242.615.666,00	2	339.631.000,00	100,00	97,04	2	339.631.000,00	6,67	48,52	Dinas Perkebunan	
	TOTAL		183	37.412.221.943,00			183	29.083.043.811,85	39	2.377.037.493,00	112	3.593.813.576,00	268	12.970.700.988,00	466	27.233.919.417,00	97,15	90,83	486	27.233.919.417,00	78,84	72,79		

Rata rata Capaian Kinerja  
Rata rata capaian program  
99,79  
97,15